

PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI KANTOR CAMAT SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA

Sarip La Adja¹

ABSTRAK

Sarip La Adja, “Pelaksanaan Good Governance di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda”. Di bawah bimbingan yang saya hormati Bapak DR, Djumadi M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra Hj, Ida Wahyuni M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Good Governace dikantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan menganalisis faktor-faktor penghambatnya.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitan ini yang meliputi penerapan prinsip-prinsip good governance adalah prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip responsivitas, prinsip keadilan, profesionalisme, faktor penghambat di kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam 2 bentuk yaitu data primer yang sumber datanya diperoleh dari pihak yang menjadi sumber informasi yakni key informan dan informan lainnya, dan data skunder yang sumber datanya didapat dari bacaan seperti monografi kecamatan, profil kecamatan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian pustaka dan penelitian dilapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentaasi. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana.

Berdasarkan Hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance, dalam pelaksanaannya pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan masih terkesan acuh tak acuh dan kurangnya disiplinnya terhadap waktu Sebagian besar hal ini karena kurangnya profesionalisme pegawai didalam kedisiplinan kerja.

Kata Kunci : Good Governance, Kecamatan

PENDAHULUAN

Semangat reformasi telah mewarnai perjalanan Pemerintah Kota Samarinda dengan mewujudkan tata kelola aparatur/pegawainya yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah dan pembangunan dikota Samarinda, dengan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Email: syarifdonjuan26@gmail.com

mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, Pemerintah kota Samarinda berkonsentrasi penuh memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja aparatur pemerintah serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, guna terciptanya pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan sasaran atau tujuan yang diinginkan pemerintah pusat tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik atau *good governance* didaerah yang dilaksanakan pemerintah daerah, maka dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap organisasi perangkat daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa “dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah”. Peraturan pemerintah ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah untuk berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan *good governance*.

Namun, demikian untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Kecamatan masih memerlukan proses terselenggaranya pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi sementara di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda terdapat masalah yaitu:

1. Kurang transparannya informasi terhadap masyarakat karna tidak adanya papan standar operasional prosedur sehingga menyusahakan masyarakat untuk mengurus keperluannya.
2. Kurang responsifnya staf/pegawai kecamatan terlihat dari kurang ramahnya dalam memberikan pelayanan terkesan acuh tak acuh.
3. Kurangnya akuntabilitas terhadap pelayanan seperti keluhan-keluhan masyarakat terhadap pegawai yang tidak disiplin, tidak ada di kantor pada saat jam pelayanan.
4. Kurangnya sifat adil para pegawai di Kecamatan terlihat dari masih adanya diskriminasi (mengutamakan yang dikenal).
5. Kurangnya Profesionalisme para pegawai terlihat dari kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan masih lamban dan belum mampu memanfaatkan jam kerja produktif secara optimal.

Berangkat dari kondisi diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan *Good Governance* Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan *Good Governance* di Kantor Camat samarinda Ilir Kota Samarinda?
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanakan *Good Governance* di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Good Governance* di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan *Good Governanvce* di Kantor Camat samarinda Ilir Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Diharapkan menambah diskusi dan kajian administrasi negara tentang penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan tata pemerintahan.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi siapa saja yang ingin menggunakan hasil penelitian ini.
2. Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di pada Kantor Camat Samarinda ilir Kota samarinda.
 - b. Untuk melatih berfikir secara ilmiah, sistematis, mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Pelaksanaan

Secara umum implementasi sering disebut juga pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi (pelaksanaan) biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi (pelaksanaan) biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Secara sederhana Pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman 2002) mengemukakan Pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dalam kenyataannya Pelaksanaan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Jadi dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah aksi (tindakan) suatu kegiatan yang terencana berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Good governance (tata pemerintahan yang baik)

Secara terminologis Governance dimengerti sebagai pemerintahan, sehingga banyak yang beranggapan bahwa governance adalah sinonim dari Government. Interpretasi dan praktek-praktek governance lebih mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah (Hetifah, 2004:2). Governance disini dapat diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

Istilah governance sekarang mendorong para ilmuwan politik untuk tidak sekedar memperhatikan pemerintah sebagai lembaga, melainkan juga pemerintahan sebagai proses multi arah, yaitu proses pemerintah yang melibatkan pemerintah dengan unsur-unsur di luar pemerintah. Menurut Leftwich, Rhodes (dalam Dwipayana, 2003: 8) Governance adalah bentuk interaksi antara negara dan masyarakat sipil. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia tampaknya tidak dijumpai sama sekali konsep governance.

Istilah governance tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Posisi pemerintah yang lemah mau tidak mau memunculkan pertanyaan bagaimana peran pemerintah dapat diperkuat kembali, serta model alternatif penyelenggaraan pemerintah yang lebih cocok. Governance justru membatasi ruang gerak pemerintah, dimana ruang gerak pemerintah dibatasi oleh mekanisme partisipatif dari masyarakat.

Tujuan good governance

Good governance merupakan suatu upaya mengubah watak pemerintah untuk tidak bekerja sendiri tanpa memperhatikan kepentingan atau aspirasi masyarakat. Di dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang menerapkan good governance, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek, tetapi dipandang sebagai subyek yang turut mewarnai program-program dan kebijakan pemerintahan. System pemerintahan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek hanya terdapat dalam system pemerintahan yang demokratis.

Prinsip good governance

Indonesia merupakan salah satu Negara didunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun keadaan-keadaan saat ini belum menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dengan harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja diluar wewenang kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi pemerintahan.

Hambatan Penerapan Good Governance

Informasi mengenai penerapan good governance dalam berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia sudah mulai banyak tersedia. Bahkan, banyak pula rekomendasi yang telah diberikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah dan juga unsur-unsur non-pemerintah, mengenai cara atau strategi memperbaiki penerapan good governance yang ada di Indonesia. Namun sejauh ini belum ada upaya yang sistematis untuk mengembangkan perbaikan penerapan good governance dan belum ada strategi nasional yang menyeluruh dan sistematis untuk mewujudkan good governance di Indonesia.

Definisi Konseptual

Untuk memberikan arahan penelitian ini, maka kembali ditegaskan “Pelaksanaan good governance adalah tindakan suatu kegiatan yang terencana atau proses penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan dengan melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, responsive, dan profesionalisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena yang diteliti yaitu “Pelaksanaan Good Governance di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda”.

Fokus Penelitian

Adapun fokus yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan Good Governance di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda:
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Responsivitas;
 - d. Keadilan;
 - e. Profesionalisme
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Good Governance di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan *teknik purposive sampling* dan *accidental sampling*. Adapun yang

menjadi *key informan* adalah Camat dan Staff Kecamatan dan yang menjadi *informan* adalah masyarakat dan Swasta.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali, mempelajari sumber atau bahan yang diperlukan sebagai landasan penelitian berupa teori dan konsep yang keabsahannya sudah terjamin. Data tersebut dapat diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan variable penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Work Research)

Pengumpulan data, informasi dan bahan dilakukan secara langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan antara lain yaitu:

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pemilihan, pencatatan, dan pengkodean terhadap serangkaian perilaku, gejala-gejala, dan fenomena yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dan secara langsung antara peneliti dengan informan yang diarahkan pada masalah tertentu secara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun peneliti berdasarkan fokus penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai dokumen atau arsip yang relevan dan keterangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini pada Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014 : 31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Melalui kondensasi data, kita membuat data lebih kuat.

2. Penyajian Data

Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Meliputi makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodologi,

Pelaksanaan *Good Governance* di Kantor Camat Samarinda Ilir (Sarip La Adja) konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Sehingga data dapat diuji alasan atau keterpercayaannya, kekuatannya, dan confirmability validitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki topografi yang cenderung mendatar dan terletak didataran rendah. Kota Samarinda terletak pada ketinggian 7-25 meter dari permukaan laut dan berdasarkan Intruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 1997 tentang penempatan batas wilayah dan secara administratif Kota Samarinda memiliki wilayah dengan luas total 71.800 Ha. Kota Samarinda secara geografis terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat 021°81'-109°16" LS dan 116°15'16"-117°24'16" BT, seluruh wilayah kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan saat ini Samarinda memiliki 10 kecamatan diantaranya Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sungai Pinang.

Kecamatan Samarinda Ilir yang merupakan salah satu dari 10 Kecamatan yang berada di Kota Samarinda dan memiliki luas wilayah 1779 Ha. Secara administratif Kecamatan Samarinda Ilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Samarinda Kota
2. Selatan : Kecamatan Sambutan
3. Barat : Kecamatan Samarinda Ulu
4. Timur : Kecamatan Sungai Pinang

Luas wilayah Kecamatan Samarinda Ilir adalah 1779 Ha, yang terdiri dari 5 kelurahan:

1. Kelurahan Selili
2. Kelurahan Sungai Dama
3. Kelurahan Sidomulyo
4. Kelurahan Sidodamai
5. Kelurahan Pelita.

Hasil Penelitian

Akuntabilitas

Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mengacu kepada, siapa organisasi(pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan tentang prinsip akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa beberapa pegawai Kecamatan menunjukkan

sikap yang kurang bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya, sikap tidak bertanggung jawab tersebut dengan meninggalkan kantor pada saat jam kerja.

Transparansi

Transparansi adalah merupakan salah satu karakteristik good governance. Karena itu asas transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah menjadi satu hal yang sangat penting sekaligus menjadi momok bagi oknum-oknum yang dapat menghambat aktivitasnya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan tentang prinsip transparansi dapat disimpulkan Kecamatan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi tidak terbuka secara transparan karena masih ada masyarakat yang bingung tentang persyaratan.

Responsivitas

Responsivitas merupakan daya tanggap yang dimiliki oleh pegawai untuk merespon keinginan masyarakat yang membutuhkan pelayan, sehingga keinginan masyarakat tersebut dapat terpenuhi dan masyarakat tersebut mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dia dapatkan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan tentang prinsip responsivitas dalam memberikan pelayanan pegawai Kecamatan belum menunjukkan sikap yang tanggap dalam menghadapi masyarakat hal tersebut sangat menghambat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang butuh akan pelayanan.

Berkeadilan

Keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan bisa berisi sebuah tuntunan agar seseorang memerlukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasih. Keadilan juga bisa diartikan sebagai suatu keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan kewajiban.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan tentang prinsip berkeadilan dalam memberikan pelayanan pegawai Kecamatan masih terlihat adanya tindakan diskriminasi.

Profesionalisme

Profesional adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang professional. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendoong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang professional.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan tentang prinsip Profesionalisme bahwa kualitas kinerja pegawai Kecamatan Samarinda ilir sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi ada baiknya jika pegawai tidak menunda-nunda pekerjaan dan memberikan pelayanan yang ramah guna terciptanya pemerintahan yang baik (good governance)

Faktor Penghambat Pelaksanaan *Good Governance* di Kantor Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda

Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam suatu organisasi apapun bentuk serta tujuannya, Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan urus oleh manusia. (Yuniarsih dan Suatno, 2008:13).

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, dalam hal ini sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu SDM yang profesionalisme dalam kinerjanya, karena untuk fasilitas seperti komputer di Kecamatan Samarinda Ilir sangat lengkap hanya saja pegawainya kurang profesional terlihat dari beberapa pegawai terkadang tidak ada ditempat ketika masyarakat ingin mengurus keperluannya, masih adanya pegawai kurang responsif terhadap masyarakat, hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *good governance*.

Pembahasan Akuntabilitas

LAN RI dan BPKP (2001:2) menjelaskan “Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris, yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk pertanggungjawabkan, keadaan yang dipertanggung jawabkan”.

Akuntabilitas adalah prinsip yang harus dianut atau dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang dikemukakan UNDP bahwa akuntabilitas adalah dimana pengambilan keputusan disektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas), kepada publik (masyarakat umum), dan sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stake holders*)

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik, sesuai dengan format baru penyusunan LAKIP tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), untuk dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikatakan mampu mengkomunikasikan pencapaian unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Transparansi

Prinsip Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Sehingga transparansi itu sendiri dapat disimpulkan memiliki arti sebagai penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap dan tersedia dan akurat.

Prinsip Transparansi dapat diukur melalui indikator yaitu

1. Mekanisme yang menjamin system keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Suryadarma, 2007)

Pernyataan diatas indikator transparansi diperkuat oleh Mardiasmo (2003 :17) yang mengemukakan bahwa indikator Transparansi sebagai berikut

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan melalui kerjasama media masa dengan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat dilihat bahwa transparansi merupakan alat yang penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).

Responsivitas

Reponsif merupakan salah satu unsur yang terkandung di dalam good governance yang dapat ditemukan didalam prinsip good governance, penerapan prinsip reponsivitas dapat optimal ketika responsive atau daya tanggap organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dengan berdaya tanggap yang cepat agar terlaksananya penyelenggaraan yang baik.

Responsivitas merupakan daya tanggap yang harus dimiliki oleh pegawai untuk merespon keinginan masyarakat yang membutuhkan pelayan, sehingga keinginan masyarakat tersebut dapat terpenuhi dan masyarakat tersebut mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dia dapatkan. Responsivitas sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya responsivitas yang baik yang ada di seorang pegawai maka kinerja yang dihasilkan akan lebih maksimal.

Menurut Wibawa (2005:331) yakni daya tanggap yang cepat dan pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Pada kenyataannya responsivitas para pegawai di Kecamatan Samarinda Ilir belum maksimal karena masih ada beberapa pegawai yang memberikan pelayanan kurang ramah dan tidak ada kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat.

Keadilan

Keadilan adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh semua orang, terutama bagi yang memiliki wewenang, jabatan, atau kekuasaan sebuah lembaga, instansi, atau pemerintahan. Keadilan merupakan bentuk dari kata yang

bermakna tidak berat sebelah (diskriminasi), berpihak kepada yang benar dan sepatutnya, serta tidak sewenang-wenang. Semua orang harusnya memiliki sifat adil atau keadilan dalam diri mereka, keadaan paling keil bisa mewujudkan dalam keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi diri sendiri. Bila seseorang sudah bisa bersikap adil pada dirinya sendiri, bukan tidak mungkin dia akan bersikap seperti itu pula kepada orang lain. Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan bisa berisi sebuah tuntutan agar seseorang memerlukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasih. Keadilan juga bisa diartikan sebagai suatu keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Adil dalam artian yakni tidak membeda-bedakan atau di samaratakan.

Pada dasarnya, keadilan bisa dibagi menjadi berbagai macam sesuai dengan pengklasifikasinya. Keadilan bisa diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, keadilan dibagi menjadi dua, yakni keadilan individual (keadilan yang bergantung kepada masing-masing individu) dan keadilan sosial (keadilan yang bergantung pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ideology). Berdasarkan jenisnya, keadilan bisa dibagi menjadi 3, yakni keadilan legal atau keadilan moral, keadilan keadilan distribusi, dan keadaan kumulatif. Klasifikasi keadaan tersebut tetap berpedoman pada pancasila, UUD1945, peraturan pemerintah, dan aturan resmi lainnya.

Profesionalisme

Profesional adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang professional. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendoong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang professional. Adapun ciri-ciri profesionalisme adalah

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal.
Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya pada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” ialah suatu perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
2. Meningkatkan dan memelihara profesional
Profesional yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesional melalui perwujudan perilaku professional. Perwujudan dilakukan melalui berbagai-bagai cara misalnya penampilan, percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.
3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan professional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi

Profesionalisme ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Good Governance di Kantor Camat Samarinda Iilir Kota Samarinda

Dalam hal ini sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu SDM yang profesionalisme dalam kinerjanya, karena untuk fasilitas seperti komputer di Kecamatan Samarinda Iilir sangat lengkap hanya saja pegawainya kurang profesional terlihat dari beberapa pegawai terkadang tidak ada ditempat ketika masyarakat ingin mengurus keperluannya, masih adanya pegawai kurang responsif terhadap masyarakat, hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan good governance.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dan wawancara mengenai Pelaksanaan Good Governance di Kantor Camat Samarinda Iilir Kota Samarinda, penulis akan mengambil kesimpulan serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

1. Dalam pelaksanaan *Good Governance* untuk penerapan prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab pegawai kecamatan Samarinda ilir dalam kedisiplinan waktu masih kurang karena masih adanya pegawai yang telat datang, dan tidak ada diruangan ketika jam pelayanan.
2. Masih lemahnya transparansi di Kantor Kecamatan Samarinda Iilir karena belum adanya SOP dikantor tersebut. Untuk pelaksanaan prinsip transparansi di kantor Kecamatan Samarinda ilir belum maksimal, karena tidak ada papan SOP di kecamatan.
3. Lokasi pelayanan sudah baik karena lokasi aman dan nyaman serta mudah dijangkau oleh masyarakat Kecamatan Samarinda Iilir
4. Dari segi responsivitas pegawai Kecamatan Samarinda Iilir masih kurang dalam melayani masyarakat dikarenakan pegawai belum menunjukkan sikap ramah.
5. Dari prinsip berkeadilan pegawai Kecamatan Samarinda Iilir masih terdapat tindakan diskriminasi dalam proses pelayanan.
6. Faktor penghambat yang ada di Kecamatan Samarinda Iilir adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional terlihat dari beberapa pegawai yang terkadang tidak ada ditempat ketika masyarakat ingin mengurus keperluannya, masih adanya pegawai yang kurang responsive terhadap masyarakat, hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *Good Governance*.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebu meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Kecamatan harus lebih disiplin dan tepat waktu ketika masuk kerja.
2. Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda harus lebih tegas lagi terkait masalah kedisiplinan para pegawainya karena dampak dari ketidak disiplinan para pegawai mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam pengurusan menjadi lambat.
3. Pegawai kecamatan Samarinda ilir diharuskan lebih ramah lagi dalam memberikan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi puas dan senang mengurus dikantor tersebut.
4. Pegawai Kecamatan harus adil dalam memberikan pelayanan, tidak ada lagi tindakan diskriminasi.

Daftar Pustaka

- AAGN Ari Dwipayana, AbdurRozaki, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute For Research and Empowerment (IRE) Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gabriel Amin Silalahi, 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: PT. Citra Media.
- Hatifah, Sumarto. 2003. *Inovasi Partipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Istianto, Bambang. 2011. *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jalaluddin, Rakhmat, 2012. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miftah Thoha, 2005. *Politik Birokrasi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Sangkala. 2012. *Dimensi Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Syahrani.2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: PustakaPelajar

Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta :BumiAksara

_____.2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: BumiAksara

Wibawa, Samodra. 2005. *Reformasi Administrasi (Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik)*. Yogyakarta: Gava Media

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan StudiKasus*. Jakarta: PT. BukuSeru

Dokumen-Dokumen

UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2.

UU No.43 tahun 1999 tentang kepegawaian

PP RI No.19 Tahun 2008 tentang Organisas tata kerja Kecamatan.

PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

www.aparatupemerintahfisip